



Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Berani Laporkan

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Seminar Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Gedung

TP PKK Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (14/11). Mengusung tema 'Media, Gender, dan Kekerasan: Membangun Jurnalisme yang Berkeadilan', seminar tersebut diikuti sejumlah media massa, kader masyarakat, lembaga layanan perempuan dan anak,

serta berbagai forum dan komunitas jurnalis di Kota Yogya.

Kepala DP3AP2KB, Retnaningtyas mengatakan, tujuan pelibatan media dalam seminar ini untuk membantu pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat terkait perlindungan terhadap pe-

rempuan dan anak, serta bagaimana mencegah terjadinya kekerasan. "Teman-teman media inilah yang membantu kita bagaimana memberitakan ke masyarakat secara luas, memberi pemahaman ke masyarakat tentang kekerasan, penanggulangannya seperti apa, kenapa harus melapor," kata Retnaningtyas.

Ia menyebutkan, data dari Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Kota Yogya pada tahun 2023 terdapat 248 kasus kekerasan di mana 87 persen korbannya adalah perempuan. Mayoritas korbannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian, di tahun 2024 hingga bulan September tercatat ada 148 laporan kejadian kekerasan di mana 65 persennya dialami perempuan dan terbanyak adalah korban KDRT.

"Sedikit menurun (kasusnya) dibandingkan tahun lalu. Beberapa bulan naik laporannya bukan karena korbannya yang bertambah, tetapi kesadaran masyarakatnya yang meningkat. Bagaimana mereka berani melapor dan ke mana harus melapor," jelasnya.

Ketua TP PKK Kota Yogya,

Sugiharto Mulya Handayani menyampaikan bahwa opini publik mengenai perempuan dapat dibentuk melalui pemberitaan di media. Sehingga menurutnya penting bagi media untuk memberikan informasi yang adil dan tidak bias. "Perempuan sering kali dianggap lemah, padahal mereka memiliki kontribusi besar dalam kehidupan. Namun, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang serius hingga hari ini," kata Sugiharto.

Sementara itu, Konselor Hukum Rifka Annisa, Nurul Kurniati menyebutkan, di Rifka Annisa sendiri, KDRT masih menjadi kasus tertinggi, disusul kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan pelecehan. Laporan biasanya datang dari korban, pihak kedua seperti keluarga atau teman dekat, atau dari lembaga seperti Satgas PPKS di kampus. Meski demikian, ia mengaku stigma sosial dan ancaman yang dirasakan korban seringkali menghambat proses pelaporan.

"Banyak korban yang tidak berani melapor atau memilih menutup diri karena takut stigma dan reaksi masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri," sambungnya. **(C-12)**



Seminar antikekerasan terhadap perempuan di Gedung TP PKK Balai Kota Yogyakarta, Kamis (14/11).
MERAPI-WAHYU TURI K

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005